

# 2025



Nomor : 16.13/RIS/VI/2025



## RISALAH RAPAT PARIPURNA

Senin, 2 Juni 2025

- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029;

16





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@logjakota.go.id](mailto:dprd@logjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.logjakota.go.id](mailto:dprd@intra.logjakota.go.id)

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 2 Juni 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029  
Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan Rapat :  
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir  
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir  
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :  
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.  
2. Wali Kota Yogyakarta.  
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.  
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.  
5. Wartawan.

---

---

### **Pembawa Acara**

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

## **RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA HARI SENIN, TANGGAL 2, BULAN JUNI, TAHUN 2025**

**DENGAN ACARA :**

- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 32 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin, 2 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut atas Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029 yang disampaikan pada rapat paripurna Hari Jumat tanggal 19 Mei 2025 yang lalu.



Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut.

Sebelumnya terlebih dahulu saya mohon kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menyebutkan juru bicaranya masing-masing serta urutan penyampaiannya, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Menugaskan kepada Saudari Novita Mawar Sharon, Urutan ke-1
2. Fraksi Partai Gerindra  
Menugaskan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, Urutan ke-2
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Menugaskan kepada Saudara Cahyo Wibowo, S.T., Urutan ke-3
4. Fraksi Partai Golkar  
Menugaskan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, Urutan ke-4
5. Fraksi Partai Amanat Nasional  
Menugaskan kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T., Urutan ke-5
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Menugaskan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn, Urutan ke-6
7. Fraksi Partai Nasdem  
Menugaskan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, Urutan ke-7

Terimakasih disampaikan kepada masing-masing Pimpinan Fraksi yang telah menyampaikan Juru Bicaranya.

Untuk kesempatan pertama sesuai urutannya, saya persilahkan kepada Saudari Novita Mawar Sharon, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

#### **-- Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan --**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Novita Mawar Sharon, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Kepada Saudara Krisnadi Setyawan disilakan.

#### **----- Pemandangan Umum Fraksi Gerindra -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Krisnadi Setyawan, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Urutan ketiga adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Saudara Cahyo Wibowo, S.T. disilakan.

#### **----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Cahyo Wibowo, S.T., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.



Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Golkar -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Yogo Prasetyo Prihutomo, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partal Amanat Nasional. Kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T. disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Mohammad Sofyan, S.T., yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Berikutnya adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn. yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir adalah Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, disilakan.

**----- Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem -----**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Choliq Nugroho Adji, yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Demikian tadi telah kita simak bersama Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas raperda tersebut.

Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.

Untuk itu, kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta dimohon mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu (XXX).**



Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

**PEMBAWA ACARA :**

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

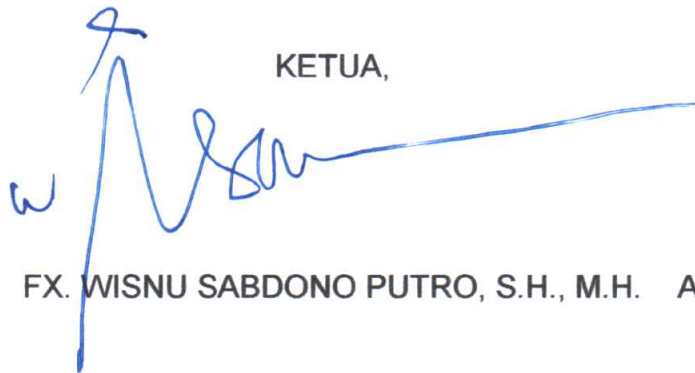
**----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----**


Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA,  
  
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Plt. SEKRETARIS,  
  
ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.  
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)-Email Intranet: [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

---

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Hari/ Tanggal : Senin, 2 Juni 2025  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 -2029  
Waktu Undangan : 13.00 WIB  
Waktu Mulai Rapat : 13.30 WIB  
Waktu Selesai Rapat : 15.30 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :

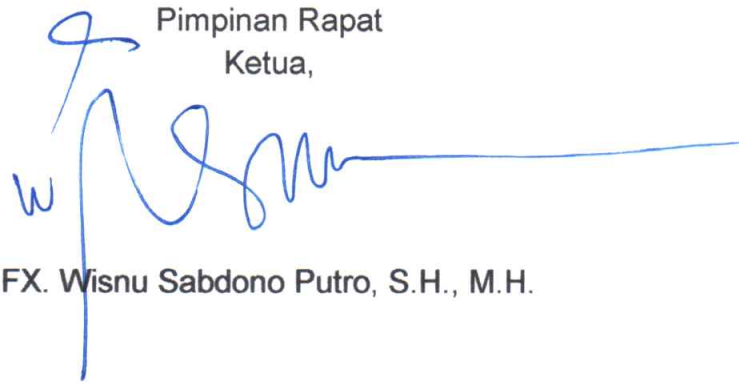
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
2. Penjabat Wali Kota Yogyakarta
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Wartawan

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 32 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi:
  - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menugaskan Saudari Novita Mawar Sharon, urutan ke-1;
  - Fraksi Partai Gerindra, menugaskan Saudara Krisnadi Setyawan, urutan ke-2;
  - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menugaskan Saudara Cahyo Wibowo, S.T., Urutan ke-3;
  - Fraksi Partai Golkar, menugaskan Saudara Yogo Prasetyo Pihutomo, Urutan ke-4;
  - Fraksi Partai Amanat Nasional, menugaskan Saudara Mohammad Sofyan, S.T., urutan ke-5;
  - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menugaskan Saudara Taufiq Setiawan, S.Sn, urutan ke-6;
  - Fraksi Partai Nasdem, menugaskan Saudara Choliq Nugroho Adji, urutan ke-7.

3. Selanjutnya materi tersebut akan menjadi bahan Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025 pukul 13.00 WIB.
4. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat  
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Nomor : 100.1.4.4 /716  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 2 Juni 2025  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta  
Acara : - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA  
FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) Email Internet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Nomor : 100.1.4.4 /716  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 2 Juni 2025  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta  
Acara : - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.  
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta  
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONG PUTRO, S.H., M.H.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN









**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦠꦤ꧀ꦢꦫꦶꦥ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax (0274)540651  
EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.setwan.jogjakota.go.id](http://www.setwan.jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
Tanggal : 2 Junii 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
Acara : Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.

**EKSEKUTIF**

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jati Prasetyo		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Alfi H		Dinas Kesehatan	2.	
3.	Enna. Susanti		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	Suprihadin		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	Su. ab		Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	Tan		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.	Ria Kinawati		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Ha R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jaldudin		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Ary byawan		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	LARA		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	Apa Tur H		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Pran Indira		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	Yulianto		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Afia R		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16. ....	
17.	M. Anhar		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	Syamsu E		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Supriyana		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦏꦤ꧀ꦠꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.setwan.jogjakota.go.id](http://www.setwan.jogjakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

Hari : Senin  
 Tanggal : 2 Junii 2025  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
 Acara : Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029.

**EKSEKUTIF**

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fibi Paulina A -		Inspektorat		
2.	Ayus Th H		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3.	Tai Hartono.		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
4.	Wuri Widayati		BKPSDM		
5.	SRI RAHAYU		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6.	Isurari M		BPBD		
7.	dr. Distantia. H.		RSUD		
8.	Sajwa		PDAM Tirta Marta		
9.	Kosim S		PD BPK Bank Jogja		
10.	Elsa Praid C		BPD DIY Cab. Senopati		
11.			PD Jogjatama Vishesha		



# **PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025 – 2029**



**Paripurna, Juni 2025**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Salam Sejahtera untuk kita semua**

**Om Swastiastu**

**Salam Kebajikan**

**Rahayu**

**Merdeka !!!**

Yang terhormat Sidang Paripurna Dewan,

Yang kami hormati Pimpinan Sidang Paripurna Dewan dan

Yang kami hormati Saudara-Saudara Anggota Dewan,

Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta

Yang saya hormati Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Saudara Seketaris Daerah dan segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

### **Rapat Dewan Yang Terhormat,**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhana Wata'ala* atas segala limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat bertemu pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap :

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

### **TAHUN 2025 – 2029**

### **Saudara Pimpinan dan Rapat Pimpinan Dewan yang terhormat,**

Setelah melakukan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan serta masukan ;

1. Penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) **Memenuhi Prinsip Strategis**

Bahwa Penyusunan RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai oleh daerah dalam 5 tahun mendatang. Selanjutnya juga harus jelas bagaimana cara menencapainya atau langkah-langkah strategis seperti apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya.

2) **Memenuhi Prinsip Demokratis dan Partisipatif**

Bahwa Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Tanpa adanya pelibatan masyarakat maupun stakeholder dalam perumusan maupun perumusan RPJMD ini tentu akan bisa menjadi penghambat atau menjadikan RPJMD ini tidak maksimal.

3) **Memenuhi Prinsip Politis**

Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD selaku mitra kerja pemerintah daerah.

4) **Memenuhi Prinsip Perencanaan Bottom-Up**

Bahwa dalam penyusunan RPJMD aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan. Hal demikian dikarenakan masyarakat adalah merupakan muara dari setiap kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

5) **Memenuhi Prinsip Perencanaan Top Down**

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional

2. Rumusan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025 - 2029 yaitu “Adil Makmur”, “Lestari” dan “Berkeadaban”. Kami memandang Visi ini tentu merupakan suatu Visi yang Sangat Bagus karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik akan tetapi juga berorientasi pada pembangunan mental dan spiritual.

Rumusan Misi yang disampaikan juga kami pandang sebagai misi yang baik dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesinambungan pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, salah satu kewenangan keistimewaan yang dimiliki oleh DIY adalah urusan tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kami berharap bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat bersinergis dan bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi terkait dengan penataan dan pemanfaatan kawasan Sumbu Filosofi (dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak).

Penataan dan pemanfaatan ruang kawasan Sumbu Filosofis ini adalah obyek vital bagi perekonomian, kemajuan dan kesejahteraan serta berkebudayaan sehingga bagaimana sinergisitas dan kerjasama dalam penataan dan pemanfaatan ruang ini akan memberikan dampak positif bagi Kota Yogyakarta.

### **Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati**

Demikian tanggapan dan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan.

Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih, serta apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Sekian,** *Wa'billahi taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokathu.*

**Salam Sejahtera untuk kita semua**

**Om Swastiastu**

**Salam Kebajikan**

**Rahayu**

**Yogyakarta, Juni 2025**  
**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Kota Yogyakarta**

Ketua

Sekretaris

**Darini, S.IP**

**Ipung Purwandari, SH**



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota**

**Yogyakarta Hari / Tanggal: Senin, 2 Juni 2025**

Atas

**Penyampaian**

**1. Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

*Yang Terhormat*

Sdr. Pimpinan Sidang

*Yang Kami Hormati*

Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sdr. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

*Yang Kami Hormati*

Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Saudara-saudara Anggota Forkopimda Kota Yogyakarta

Rekan-rekan anggota DPRD Kota Yogyakarta

Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

DPRD Kota Yogyakarta yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini.

### **Rapat Dewan Yang Terhormat**

Melalui analisis dan telaah Fraksi Gerindra terhadap rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa:

#### **A. Bagian pertama, tentang Pendidikan**

Fraksi GERINDRA Kota Yogyakarta menyampaikan apresiasi atas penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Terfokus dalam sektor pendidikan, kami memandang bahwa pembangunan bidang ini harus berakar kuat pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, negara memiliki kewajiban “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Lebih lanjut, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*” Dengan merujuk amanat konstitusi tersebut, Fraksi GERINDRA memandang bahwa penguatan sektor pendidikan dalam RPJMD tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah.

Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki capaian yang relatif tinggi, mencerminkan status Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan nasional. Indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan tren positif, bahkan melebihi rata-rata provinsi dan nasional. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Terdapat beberapa permasalahan penting dalam sektor pendidikan di Kota Yogyakarta, di antaranya adalah ;

- Ketimpangan kualitas antar satuan pendidikan

Sekolah negeri dan swasta menunjukkan disparitas dalam hal mutu guru, sarana-prasarana (termasuk digitalisasi pendidikan) dan capaian akademik. Fraksi GERINDRA menilai bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi serta peningkatan akses internet gratis yang semakin merata adalah aspek penting yang wajib terus didorong. Kualitas pendidikan yang masih belum merata juga disebabkan oleh gaji pengajar yang tidak sesuai dengan gaji atau upah



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

yang semestinya didapatkan guru atau dosen. Oleh karenanya pemerintah dengan dinas

### Derita Dosen ASN di Jogja, Beban Mengajar Tinggi, Tukin Tak Cair Hingga Minim Bonus dari Kampus

Suparyanto merasakan tanpa tukin pendapatan sebagai dosen ASN tak sebanding dengan beban kerja yang didapat. Ia dan dosen lainnya berharap tukin bisa segera cair [Paket wisata Daerah Istimewa Yogyakarta](#)

Gallih Priatmojo

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:22  
WIB



terait perlu turun kelapangan melakukan pendataan atau survei gaji guru dan dosen baik di sekolah dan kampus negeri atau swasta.

- Terbatasnya akses pendidikan inklusif

Fraksi GERINDRA menilai bahwa keterbatasan akses ini mengakibatkan masih banyak anak-anak sampai pemuda yang berpotensi tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan mereka. Kondisi ini sangat disayangkan karena dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa jurnal atau penelitian ilmiah disampaikan bahwa maraknya angka kenakalan remaja seperti klitih disebabkan oleh sulitnya akses pendidikan dan ruang aktualisasi diri untuk anak muda (Jatmiko, 2021).

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, artinya negara wajib **menjamin pembiayaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya**. Ini memiliki konsekuensi langsung terhadap pengalokasian anggaran dalam RPJMD, khususnya pada pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Sejalan dengan putusan tersebut, Fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah Daerah menyesuaikan RPJMD dengan menegaskan komitmen terhadap pembiayaan pendidikan dasar secara gratis dan inklusif. Setiap program dan kegiatan dalam sektor pendidikan harus menjamin



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651  
akses pendidikan dasar yang bebas biaya, tanpa diskriminasi, dan berkualitas. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan.

### **Biaya Kuliah Yogyakarta Disebut Termahal di Indonesia, Ini 10 Provinsi dengan Biaya Kuliah Terbesar**

Kompas.tv - 19 Juli 2023, 14:15 WIB

Share:



Close Ads x

### **MK: Negara Biayai Pendidikan Dasar di Sekolah/Madrasah Swasta Selama Memenuhi Syarat**

Selasa, 27 Mei 2025 | 16:09 WIB

Cetak Dibaca: 114



Para Pemohon Prinsipal bersama kuasa hukum berfoto bersama usai sidang Putusan uji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Selasa (27/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

## **B. Bagian kedua, tentang Kesehatan**

Fraksi GERINDRA Kota Yogyakarta dengan sungguh-sungguh menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam memperkuat sektor kesehatan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah 2025-2029. Upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Pasal ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.

Upaya peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan di Kota Yogyakarta adalah manifestasi nyata dari semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi seperti disparitas akses layanan, kendala dalam pemerataan fasilitas kesehatan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga medis, harus segera mendapat perhatian serius dan tindakan konkret.

Fraksi GERINDRA menyambut positif upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup yang terus mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Hal ini



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

menunjukkan keberhasilan kebijakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Namun, ada yang patut menjadi catatan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu segera ditangani secara serius, seperti masih adanya angka kematian bayi dan balita, stunting, serta tingkat kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, akses dan mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya merata dan optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan dan program kesehatan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas layanan yang humanis, berorientasi pada pencegahan, serta berkelanjutan.

Dengan demikian, fraksi GERINDRA berharap agar pembangunan sektor kesehatan di Kota Yogyakarta dapat terus ditingkatkan sebagai wujud nyata kepatuhan pada konstitusi, sekaligus implementasi nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia.

### **c. Bagian ketiga, tentang Ketenagakerjaan dan Ketimpangan Pendapatan**

Indeks gini Kota Yogyakarta merupakan yang paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2023 gini ratio Kota Yogyakarta sebesar 0,454, sedangkan DIY 0,449 dan nasional 0,381. Nilai indeks gini tertinggi tercatat pada tahun 2022 mencapai 0,519 yang masuk pada kategori ketimpangan tinggi. Tingginya ketimpangan di Kota Yogyakarta dan DIY terkait dengan permasalahan tenaga kerja atau buruh. Hal tersebut dapat diamati dari berbagai penelitian dan jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa tingginya angka ketimpangan di Yogyakarta bermula dari rendahnya upah minimum. Seperti penelitian yang penelitian (Pangestu et al., 2023) disimpulkan bahwa selisih upah minimum dengan biaya kebutuhan hidup layak menjadi penyebab DIY termasuk Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan upah minimum yang setidaknya sesuai dengan biaya kebutuhan hidup layak yang berkisar Rp3.000.000 – Rp 4.000.000.



## FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

# GERINDRA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

I. Pangestu, Z. Qodir, V. R. Utama

Table 5  
The Discrepancy in the Value of Labor in Yogyakarta in 2023

Regency/City	Components of Decent Living	Minimum wage	Discrepancy
Yogyakarta	IDR 4,125,834	IDR 2,324,775	IDR 1,801,059
Sleman	IDR 3,633,250	IDR 2,159,519	IDR 1,473,731
Bantul	IDR 3,491,590	IDR 2,066,438	IDR 1,425,152
Kulon Progo	IDR 3,138,832	IDR 2,050,447	IDR 1,088,385
Gunung Kidul	IDR 3,054,343	IDR 2,049,266	IDR 1,005,077

Source: FPPI & BPS 2023

Selain itu, pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendorong kesejahteraan buruh dengan mendirikan rumah untuk pekerja. Hal tersebut dapat menjadi solusi karena upah minimum yang rendah tidak berkorelasi dengan biaya sewa atau harga rumah di Yogyakarta yang sangat tinggi. Biaya sewa tempat tinggal atau harga rumah yang mahal di Yogyakarta menjadi pengeluaran wajib para pekerja, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang rendah.

### MPBI DIY Tuntut Revisi UMK Menjadi Rp 3,5 Juta dan Penyediaan Rumah Murah dengan Angsuran Rp 500 Ribu per Bulan



Din Miftahudin, Winda Atika Ira Puspita - Selasa, 21 Mei 2024 | 21:00 WIB



### D. Bagian keempat, tentang Tata Kelola Kota dan Sampah

Pengelolaan tata Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya dan Pariwisata harus tetap mengedepankan aspek humanis. Kebudayaan tentu tidak bisa dipisahkan dari manusia yang hidup dan menghidupi kebudayaan. Begitu pula pariwisata yang tidak



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

dapat dipisahkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, penataan Kota Yogyakarta yang tengah gencar dilakukan guna menunjang proyek sumbu filosofi mesti memikirkan hajat hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Guru Besar Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada Bakti Setiawan dalam (Firdaus, 2023) bahwa revitalisasi dan penataan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta diharapkan tidak meminggirkan masyarakat, termasuk yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Apalagi, sejatinya Sumbu Filosofi Yogyakarta bukan hanya milik penguasa, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, penutupan TPST Piyungan yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas tempat pengolahan sampah terpadu yang sebanding menyebabkan sampah-sampah tidak diolah dan menumpuk sehingga menjadikan Kota Yogyakarta ditetapkan dalam kondisi darurat persampahan. Pengentasan permasalahan sampah perlu menjadi salah satu langkah prioritas yang dilaksanakan pemerintah Kota Yogyakarta. Berlarutnya masalah tersebut dapat menimbulkan efek diberbagai sektor seperti pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberi solusi konkret permasalahan sampah, seperti melakukan sosialisasi pemilhan sampah, pengelolaan sampah di TPS dan penyediaan teknologi pengentasan sampah. Beberapa alat modern yang sudah menjadi solusi sampah di beberapa daerah dan negara lain seperti alat pengubah sampah menjadi bahan bakar.



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**



Jl. Ipda Tut Harsono No 43 Yogyakarta Kode Pos :55165 Telp. (0274 ) 540650 Fak (0274 ) 540651

### **Solusi permasalahan sampah di Yogyakarta**

🕒 3 Juni 2024 16:00 WIB



Demikian Pandangan Umum kami Fraksi Gerindra, kiranya kita bersama-sama bisa bekerja bahu-membahu untuk Kota Yogyakarta yang kita cintai demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Demikian, jika ada kata kurang berkenan dari beberapa hal yang kami haturkan, mohon dimaafkan.

Saudara Pimpinan dan Rapat Dewan beserta Walikota atau Wakil Walikota yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Sekian,

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Hormat Kami,

**Ketua Fraksi**

**Sekretaris Fraksi**

**Pemandangan Umum**  
**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Terhadap**  
**Rancangan Peraturan Daerah**  
**Tentang**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Dewan,

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yang kami hormati Saudara Walikota Yogyakarta,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Segenap Jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Para Undangan, serta Rekan-Rekan Jurnalis,

Segala puji bagi Allah Robbul 'Alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga hari akhir zaman.

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku Juru Bicara Fraksi untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029**

Saudara Walikota, Saudara Pimpinan serta hadirin yang berbahagia, Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi PKS ini, adalah dalam rangka bagian dari tanggungjawab dan

fungsi DPRD untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sekaligus dalam rangka menjalankan fungsi *checks and balances*. Karena Peraturan Daerah atau Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan perda salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Setelah mencermati dan mempelajari draft Rancangan Peraturan Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan informasi yang kami dapat ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini.

### **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029**

Dalam merumuskan konsep pembangunan Kota Yogyakarta, harapannya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengacu pada upaya penyelesaian masalah yang ada pada masyarakat, sehingga konsep pembangunan yang kemudian dirumuskan menghasilkan sebuah tahapan-tahapan teknis dan strategis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, selain itu konsep pembangunan harapannya juga dapat memberikan ruang partisipasi yang besar untuk masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek tapi juga sebagai subjek. dengan dasar pemikiran demikian Fraksi PKS memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 :

#### **1. Penanganan Permasalahan Sampah**

Dalam proses penyelesaian permasalahan sampah jangka panjang literasi lingkungan masyarakat memiliki faktor penting dalam pengelolaan sampah, karena masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman permasalahan lingkungan akan lebih memungkinkan untuk berpartisipasi dalam program zero sampah anorganik dan daur ulang, Sehingga dalam dokumen RPJMD perlu menyertakan indikator perubahan perilaku warga diantaranya angka presentase rumah tangga yang memilah sampah dan strategi edukasi yang terprogram.

Selanjutnya catatan lain dari Fraksi PKS dalam dokumen RPJMD yang berkaitan dengan permasalahan sampah adalah peningkatan volume sampah yang terjadi sehingga diperlukan proyeksi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi

yang akan meningkatkan volume timbulan sampah rumah tangga dan komersial. Sehingga target pengurangan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) perlu disertai baseline data yang jelas dan target tahunan yang terukur.

Ketergantungan Kota Yogyakarta pada TPA Piyungan menunjukkan vulnerabilitas pengelolaan sampah. Diperlukan kebijakan jangka menengah untuk desentralisasi pengelolaan (TPS3R di tiap kemantren) dan penguatan ekonomi sirkular, salah satunya adalah dengan pemerataan infrastruktur 3R, karena masih banyak kemantren yang belum memiliki infrastruktur Bank Sampah aktif dan fasilitas pengolahan terpadu. Perlu ada peningkatan investasi dan pendampingan kelembagaan. Sehingga berdasarkan studi tersebut kemudian Fraksi PKS mendorong lima rekomendasi dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta yaitu :

1. Tetapkan target pengurangan sampah minimal 30% dan pengolahan 70% pada tahun 2029 sesuai amanat Perpres No. 97 Tahun 2017.
2. Tambahkan program prioritas khusus: “*Transformasi Tata Kelola Sampah Berbasis Komunitas dan Teknologi*”.
3. Libatkan kalangan pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas kreatif dalam gerakan *zero waste city*.
4. Kembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan bisnis.
5. Integrasikan sistem digital monitoring sampah (dashboard real-time untuk tiap kemantren).

## **2. Percepatan Pembangunan Kawasan Penyangga Ekonomi Bagian Barat dan Selatan**

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan langkah konkret percepatan pembangunan kawasan penyangga ekonomi di wilayah barat dan selatan kota. Kedua wilayah tersebut selama ini relatif tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur ekonomi dibandingkan kawasan tengah dan timur kota, padahal memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, pertanian perkotaan, serta ekonomi kreatif berbasis masyarakat lokal. Implementasi RTRW secara konsisten di wilayah ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tetapi juga mengurangi ketimpangan wilayah dan kepadatan pusat

kota. Percepatan ini perlu disertai penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, ruang publik, fasilitas pelatihan keterampilan, serta dukungan modal bagi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kawasan penyangga di barat dan selatan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi justru motor penggerak ekonomi baru yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan warga Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.

### **3. Penambahan Ruang Terbuka Hijau di seluruh Kematren**

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di seluruh kamatanren menjadi kebutuhan mendesak yang selaras dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan minimal 30% dari luas wilayah kota harus berupa RTH, dengan 20% di antaranya merupakan RTH publik. Saat ini, berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, proporsi RTH publik di Kota Yogyakarta masih berada di bawah angka ideal tersebut, yakni sekitar 18%, dan distribusinya belum merata antar kamatanren. Penambahan RTH publik tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan estetika kota, tetapi juga memperkuat ketahanan iklim, mengurangi risiko banjir, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Selain itu, penyediaan RTH yang merata di setiap kamatanren akan mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat fungsi sosial ruang kota, dan meningkatkan indeks kebahagiaan warga Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.

### **4. Ketersediaan TPU**

Selain persoalan sampah, persoalan ketersediaan lahan makam juga perlu dicermati sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Yogyakarta. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ketersediaan tempat pemakaman umum (TPU) yang layak, tertata, dan mudah diakses menjadi semakin terbatas, sementara kebutuhan akan layanan pemakaman tetap berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong adanya program revitalisasi makam-makam yang ada agar lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus memastikan bahwa biaya pemakaman tetap terjangkau bagi seluruh warga Kota Yogyakarta. Pemerintah juga perlu mengkaji kemungkinan penambahan lahan pemakaman di wilayah-wilayah yang masih memungkinkan, serta memperkuat pengelolaan TPU berbasis komunitas dengan

dukungan pembiayaan dari APBD. Upaya ini merupakan bentuk kepedulian terhadap hak dasar warga, tidak hanya selama hidup, tetapi juga setelah meninggal dunia.

## **5. Pembuatan Jogging Track di seluruh Kecamatan**

Sebagai bagian dari visi hidup sehat yang digaungkan oleh Wali Kota Yogyakarta, pembangunan jogging track di 14 kecamatan se-Kota Yogyakarta menjadi langkah strategis dalam membudayakan olahraga kebugaran sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Saat ini, olahraga bukan lagi sekadar aktivitas fisik, melainkan sudah menjadi kebutuhan dan identitas gaya hidup (lifestyle) masyarakat urban. Ketersediaan jogging track yang aman, nyaman, dan mudah diakses akan mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik rutin, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan fisik dan mental, serta menurunkan beban biaya kesehatan dalam jangka panjang. Selain itu, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui UMKM di sekitar area jogging track, membuka lapangan kerja, dan mendorong prestasi olahraga daerah. Dengan demikian, pembangunan jogging track tidak hanya mendukung pola hidup sehat, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

## **6. Peningkatan Kuota Jalur Afirmasi dalam Penerimaan PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta**

Fraksi PKS mengusulkan peningkatan kuota jalur afirmasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri Kota Yogyakarta sebagai upaya memperkuat keadilan akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Saat ini, profil murid di SMP Negeri Kota Yogyakarta cenderung didominasi oleh siswa dari keluarga mampu, sementara warga Kota Yogyakarta yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah justru banyak yang tidak tertampung dan terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya tinggi atau ke sekolah negeri di luar wilayah kota. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Fraksi PKS mengusulkan agar kuota afirmasi yang semula berbasis KMS/KSJPS ditingkatkan dan diperluas cakupannya dengan menggunakan basis data terbaru seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan DTSeN (Data Terpadu Sosial ekonomi Nasional), dengan kuota afirmasi minimal sebesar 30% dari total daya tampung. Kebijakan ini akan memastikan pendidikan negeri di Kota Yogyakarta lebih inklusif dan berpihak kepada warga kota sendiri, khususnya

kelompok rentan dan miskin, sejalan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sosial dalam pembangunan daerah.

## **7. Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Warga Kota Yogyakarta**

Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat peranannya dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warga, khususnya yang belum tercakup dalam program BPJS Kesehatan. Masih terdapat sejumlah warga, baik yang belum terdaftar maupun yang mengalami tunggakan iuran, sehingga tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal. Untuk itu, Pemkot perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi warga rentan tersebut, melalui skema pembiayaan kesehatan daerah atau program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 28H dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan yang inklusif. Dengan demikian, tidak ada warga Kota Yogyakarta yang terhambat mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administratif atau ekonomi

## **8. Pembuatan Youth Center di Seluruh Kecamatan**

Dalam rangka mendukung pengembangan potensi generasi muda, Fraksi PKS mengusulkan penambahan *Youth Center* di setiap kemantren di Kota Yogyakarta sebagai ruang ekspresi, kreativitas, dan penguatan kapasitas pemuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, jumlah penduduk usia 15–30 tahun mencapai lebih dari 20% dari total populasi, menunjukkan bahwa segmen pemuda merupakan aset strategis pembangunan daerah. Namun, hingga saat ini belum semua wilayah kemantren memiliki fasilitas representatif untuk kegiatan kepemudaan. Kehadiran *Youth Center* yang dilengkapi dengan sarana pelatihan, ruang seni budaya, serta fasilitas olahraga dan literasi digital akan memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan inovator lokal. Selain itu, *Youth Center* juga berperan dalam pencegahan perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam program-program pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

## **9. Revitalisasi Kampung Wisata di Kota Yogyakarta**

Fraksi PKS mendorong agar dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029 dimuat komitmen kuat terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui program revitalisasi kampung wisata. Kampung wisata memiliki peran strategis sebagai destinasi unggulan alternatif yang melengkapi kawasan Malioboro, dengan menawarkan keunikan budaya, kerajinan, kuliner, serta kearifan lokal yang autentik. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, terdapat lebih dari 20 kampung wisata yang telah terbentuk, namun banyak di antaranya masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur, kapasitas SDM, promosi, dan integrasi dengan ekosistem pariwisata kota. Oleh karena itu, revitalisasi kampung wisata perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi promosi, dukungan pembiayaan UMKM lokal, serta peningkatan kualitas atraksi dan layanan wisata. Program ini tidak hanya akan memperluas sebaran kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi, pelestarian budaya, dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

## **10. Pengembangan Kegiatan Budaya di Kemantren**

Fraksi PKS mendorong agar RPJMD Kota Yogyakarta 2025–2029 memuat program pengembangan kegiatan budaya secara merata di setiap kemantren sebagai upaya pelestarian warisan budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat lokal. Yogyakarta sebagai Kota Budaya memiliki kekayaan seni dan tradisi yang beragam di tiap wilayah, namun belum seluruh kemantren memiliki dukungan fasilitas maupun program berkelanjutan untuk pengembangan seni budaya komunitas. Dengan menyelenggarakan kegiatan budaya secara rutin dan terprogram di tingkat kemantren—seperti festival lokal, pelatihan seni tradisi, dan pementasan komunitas—Pemerintah Kota tidak hanya memperkuat identitas kultural masyarakat, tetapi juga membuka ruang ekspresi, regenerasi pelaku budaya muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya. Selain menjadi sarana edukasi lintas generasi, kegiatan ini juga dapat mendukung pariwisata lokal dan mempererat kohesi sosial masyarakat di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan kurang berkenan di hati.

Terimakasih atas perhatiannya

*Wassalamualaikum wr.wb*

**Fraksi Keadilan Sejahtera**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**

**Cahyo Wibowo, S.T.**

Ketua

**Fajar Kurniawan, S.IP.**

Sekretaris



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029**

Disusun Oleh:

**Fraksi Partai Golongan Karya**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD )  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029**

---

---

*Disampaikan pada :*

Hari : Senin  
Tanggal : 2 Juni 2025  
Jam : 13.00 WIB  
Juru Bicara : Yogo Prasetyo Pri Hutomo

---

---

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan beserta seluruh Anggota Dewan;

Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekertaris Daerah beserta seluruh Jajaran Eksekutif;

Rekan-rekan Wartawan, para Tamu Undangan dan segenap hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Walikota Yogyakarta, yang telah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 pada paripurna yang lalu.

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat

terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menindaklanjuti segera

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD). Penyusunan RPJMD dimulai dari rancangan teknokratik ( Rantek) RPJMD yang di dalamnya sebagian substansinya menjadi masukan dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029.

Pemerintah kota Yogyakarta telah melaksanakan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang dimulai dari penyelenggaraan konsultasi publik, konsultasi dengan DPRD dan DIY, verifikasi rencana strategis Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) RPJMD. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai arah pembangunan selama 5 tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini telah berpedoman pada RPJPD, RPJMN Nasional maupun RPJMD DIY serta dokumen lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,***

Setelah mencermati Penjelasan Walikota Yogyakarta atas Penjelasan Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa:

1. Pada Perumusan Misi point 1 disebutkan bahwa “ **Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan** ”. Kami Fraksi Partai Golkar mendorong terwujudnya anak wajib sekolah di Kota Yogyakarta. Mengingat adanya program sekolah yang sudah menggratiskan SPP dsb, masih banyak anak di Kota Yogyakarta yang tidak sekolah. Tentu saja juga perlu adanya koordinasi penuh antara OPD yang terkait agar tersinergi dengan baik sehingga dapat terwujud.

2. Pada Perumusan Misi point 2 disebutkan bahwa “ **Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari** ”. Kami Fraksi Partai Golkar mendorong terwujudnya Infrastruktur hijau atau ramah lingkungan yang dapat menciptakan kota yang lebih layak huni melalui integrasi elemen alam, seperti taman dan ruang hijau, ke dalam lanskap perkotaan. Penerapan infrastruktur hijau dapat mendukung keanekaragaman hayati, mendorong inklusivitas sosial, berkontribusi terhadap ketahanan perkotaan, dan mempertahankan kualitas hidup.
3. Pada Perumusan Misi point 3 disebutkan bahwa “ **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal** ”. Kami Fraksi Partai Golkar mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif dan kreatif. Ini melibatkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Seperti halnya : Mendorong pengembangan UMKM lokal dengan memberikan akses modal, pelatihan, dan pemasaran. Melestarikan dan mengembangkan produk kerajinan tangan lokal sebagai komoditas unggulan. Membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Memberikan pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Pada Perumusan Misi point 4 disebutkan bahwa “ **Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat ( Ampera ), Pancasila dan UUD 1945** ”. Kami Fraksi Partai Golkar mendorong terwujudnya Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas korupsi dan

berkeadaban memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, dan menjamin penggunaan dana yang tepat sasaran. Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah konkret untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

5. Pada Perumusan Misi point 5 disebutkan bahwa “ **Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY** ”. Kami Fraksi Partai Golkar mendorong untuk memperkuat usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Tujuan ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan fisik, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperkuat perjuangan dalam mencapai tujuan keistimewaan, diharapkan pemerintah DIY dan masyarakat dapat bersama-sama membangun DIY yang lebih sejahtera, maju, dan berkeadilan, serta mampu menjaga identitas dan kekhasan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kami Fraksi Partai Golkar mendukung dan mendorong tercapainya Visi dan Misi dengan 8 ( delapan ) program strategis yang sudah dituliskan di Penjelasan Walikota pada Paripurna yang lalu.

**Saudara Walikota dan hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

*Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara.*

*Dan mohon maaf jika ada hal- hal yang kurang berkenan,*

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah,**

**Wassalamualaikum wr, wb.**

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**KETUA,**



**R.Candra Akbar Ishmata, S.H**

**SEKRETARIS,**



**Yogo Prasetyo Pri Hutomo**



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta,

**Hari / Tanggal : Senin, 2 Juni 2025  
Jam : 13.00 WIB  
Juru Bicara : Tri Waluko Widodo**

***Assalamu 'alaikum Wr. Wb.***

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah serta segenap jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang kami hormati Tamu undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029**

***Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,***

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), sebagai dokumen politik, RPJMD merupakan realisasi awal dari janji politik Walikota terpilih. Harapannya janji ini bisa direalisasikan selama lima tahun masa jabatannya. Dalam kaitan dengan hal ini maka semua janji yang disampaikan pada saat Pemilihan Walikota yang lalu sudah seharusnya dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan ini. Selain hal tersebut F- PAN mengingatkan dokumen RPJMD harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Provinsi dan RPJMN Nasional. Keterkaitan ini memastikan koherensi vertikal dan horizontal dalam kebijakan pembangunan. RPJMD juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN.

Hubungan antara RPJMD dan RPJMN sebagai penjabaran visi lokal yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN menunjukkan adanya kerangka kerja penyelarasan kebijakan yang kompleks dan berlapis. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD, yang dilakukan sebelum kepala daerah terpilih menjabat, bertujuan untuk menjaga *kesinambungan perencanaan berbasis data terlepas dari perubahan kepemimpinan politik*. Pendekatan ini dilengkapi dengan metode partisipatif, politis, atas-bawah, bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial, yang menggarisbawahi filosofi perencanaan yang komprehensif dan adaptif. ***Ini berarti RPJMD Kota Yogyakarta bukan hanya dokumen administratif lokal, tetapi merupakan penghubung operasional penting dalam rantai pembangunan nasional.*** Keberhasilannya bergantung pada kemampuannya untuk menerjemahkan tujuan nasional dan jangka panjang daerah ke dalam program-program lokal yang spesifik dan dapat dilaksanakan, sambil beradaptasi ***dengan kebutuhan lokal yang unik dan mandat politik. Proses ini menuntut negosiasi dan harmonisasi yang berkelanjutan.***

## **Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami muliakan**

F- PAN berpandangan terhadap RPJMD sebagai berikut

1. RPJMN 2025-2029 menguraikan delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau yang dikenal sebagai "Asta Cita". F - PAN berharap delapan prioritas ini menunjukkan agenda pembangunan nasional yang sangat komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, politik, lingkungan, dan budaya.

Inklusi "industri kreatif" (Prioritas 3) dan "ekonomi digital" (Prioritas 2) sangat relevan bagi Kota Yogyakarta, yang dikenal sebagai pusat budaya dan kreativitas. Penekanan pada "membangun dari desa dan dari bawah" (Prioritas 6) mencerminkan pendekatan pembangunan yang terdesentralisasi, sementara "penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya" (Prioritas 8) secara langsung beresonansi dengan identitas Yogyakarta.

***Oleh karena itu, rencana pembangunan Kota Yogyakarta (RPJMD) harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek dari prioritas nasional ini, menunjukkan bagaimana inisiatif lokalnya berkontribusi pada tujuan-tujuan yang lebih luas dan saling terkait. Ini menuntut perencanaan yang terintegrasi di berbagai sektor dalam pemerintahan kota.*** Contoh fokus nasional yang sangat penting dan secara langsung berdampak pada Yogyakarta adalah identifikasi kawasan "Borobudur-Yogyakarta-Prambanan" (BYP) sebagai destinasi pariwisata prioritas dalam RPJMN 2025-2029.

2. F- PAN memberi catatan Analisis komparatif antara RPJMD DIY 2022-2027 dan Raperda RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 menunjukkan adanya keselarasan fundamental dalam tujuan pembangunan, yang didasari oleh sistem perencanaan berjenjang dan nilai-nilai keistimewaan DIY. Kedua dokumen memiliki visi yang saling mendukung, **dengan**

**RPJMD Kota Yogyakarta secara aktif menerjemahkan visi Pancamulia DIY ke dalam konteks perkotaan yang lebih operasional.**

**Area Keselarasan Utama:**

- a. **Komitmen terhadap Keistimewaan:** Kedua dokumen secara eksplisit menjadikan nilai-nilai keistimewaan sebagai landasan pembangunan. RPJMD DIY menempatkan keistimewaan sebagai filosofi dasar, sementara Raperda RPJMD Kota Yogyakarta memiliki misi khusus untuk memperkokoh tujuan keistimewaan DIY, termasuk pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
- b. **Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial:** Baik DIY maupun Kota Yogyakarta memprioritaskan peningkatan kualitas SDM, penurunan kemiskinan, dan peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. **Keberlanjutan Lingkungan dan Tata Ruang:** Kedua dokumen mengakui pentingnya pelestarian lingkungan dan penataan ruang yang berkelanjutan. Isu-isu seperti pengelolaan sampah, RTH, dan mitigasi bencana menjadi perhatian bersama, meskipun tantangan implementasinya bervariasi.
- d. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:** Peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi menjadi tujuan bersama untuk mewujudkan *good governance*.

**Namun F- PAN juga mencatat beberapa Tantangan dan Potensi Divergensi yang harus diharmonisasi:**

- **Dinamika Periodisasi:** Perbedaan rentang waktu RPJMD DIY (2022-2027) dan Raperda RPJMD Kota Yogyakarta (2025-2029) memerlukan adaptasi dan koordinasi yang cermat dari Kota Yogyakarta untuk mengintegrasikan sisa target provinsi dan RPJMN yang baru.
- **Fokus Kewilayahan vs. Perkotaan:** RPJMD DIY memiliki fokus yang lebih luas pada pemerataan regional, khususnya pemberdayaan

Kawasan Selatan. Kota Yogyakarta, sebagai pusat perkotaan yang padat, harus menyeimbangkan perannya sebagai lokomotif ekonomi provinsi dengan penanganan isu-isu perkotaan yang kompleks seperti ketimpangan internal, keterbatasan lahan, dan tekanan lingkungan.

- **Ketergantungan Infrastruktur Regional:** Pembangunan Kota Yogyakarta sangat bergantung pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur besar di tingkat provinsi dan nasional (misalnya jalan tol, TPA regional). Keterlambatan di tingkat provinsi akan berdampak langsung pada daya dukung dan daya saing kota.
- **Implementasi Keistimewaan:** Meskipun filosofi keistimewaan kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan birokrasi, regulasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Secara keseluruhan, kedua dokumen perencanaan ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk pembangunan yang holistik dan berkelanjutan di DIY, dengan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pilar utamanya. ***Keberhasilan pembangunan Kota Yogyakarta*** akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga sinergi dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, mengelola tantangan perkotaan yang unik, serta secara efektif menerjemahkan nilai-nilai keistimewaan ke dalam program-program konkret yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Koordinasi yang intensif dan adaptasi kebijakan yang responsif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa visi pembangunan dapat terwujud secara optimal.

3. F- PAN mencermati Visi Kota Yogyakarta 2025-2045 secara eksplisit mengintegrasikan keunggulan, kemajuan, dan keberlanjutan dengan fondasi budaya dan nilai-nilai keistimewaan. Yogyakarta bukan sekadar pernyataan retorik, melainkan sebuah prinsip dasar yang tertanam kuat. Perincian pilar "Unggul," "Maju," dan "Berkelanjutan" secara konsisten mengintegrasikan elemen budaya dan keistimewaan, mulai dari pengarusutamaan budaya dalam pembangunan manusia hingga pariwisata berbasis budaya dan penataan ruang yang berkelanjutan secara budaya.

Hal ini menunjukkan komitmen mendalam untuk melestarikan dan memanfaatkan identitas unik Yogyakarta dalam setiap aspek pembangunannya. Oleh karena itu, **setiap inisiatif pembangunan di Yogyakarta, terutama dalam RPJMD 2025-2029, harus menunjukkan bagaimana menghormati, mengintegrasikan, dan meningkatkan warisan budaya kota serta status otonomi khususnya. Landasan budaya ini dapat menjadi pembeda unik bagi model pembangunan Yogyakarta dibandingkan kota-kota lain.**

4. F- PAN juga mencermati sekaligus penekanan didalam dokumen RPJPD 2025-2045 Kota Yogyakarta dibagi menjadi empat tahapan lima tahunan. Tahap pertama, yaitu periode 2025-2029, secara khusus bertema "Perkuatan Fondasi Pembangunan". merupakan pilihan strategis yang krusial . fundamental ini dirinci di empat area misi:

- **Transformasi Sosial:** Berfokus pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, membangun dasar yang kuat untuk pembangunan manusia ( Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul )
- **Transformasi Ekonomi:** Berkonsentrasi pada penguatan potensi daerah di sektor-sektor ekonomi produktif, meletakkan dasar bagi pertumbuhan di masa depan.
- **Transformasi Tata Kelola:** Berfokus pada pembentukan fungsi kelembagaan yang tepat, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, dan digitalisasi layanan publik.
- **Penataan Ruang & Infrastruktur:** Memprioritaskan pemerataan distribusi layanan infrastruktur perkotaan, yang secara cermat dipandu oleh arahan penataan ruang yang komprehensif.

Menandakan bahwa lima tahun pertama ini sangat penting untuk meletakkan dasar yang kokoh guna mencapai visi ambisius 2045. Hal ini menyiratkan penekanan pada aspek-aspek fundamental:

Oleh karena itu F - PAN berharap RPJMD 2025-2029 Kota Yogyakarta memprioritaskan program-program yang bertujuan untuk membangun kapasitas, meningkatkan layanan fundamental, dan menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan di masa depan, daripada berfokus pada pembangunan yang cepat dan

ekstensif. Strategi fundamental ini perlu diartikulasikan dan dioperasionalkan dengan jelas dalam rencana dan program spesifik kota.

### **Hadirin Yang kami muliakan, akan kami simpulkan Pandangan F - PAN terkait Raperda ini**

Dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebuah proses yang kompleks, multi-dimensi, dan sangat terstruktur. Dokumen ini bukan sekadar rencana teknis, melainkan cerminan dari interaksi antara mandat politik kepala daerah terpilih, kerangka hukum dan birokrasi yang ketat, serta aspirasi beragam dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses ini secara fundamental melibatkan ***keseimbangan antara pendekatan teknokratik yang berbasis data, partisipasi publik yang inklusif, dan negosiasi politis yang krusial.*** Rancangan teknokratik yang disiapkan sebelum pelantikan kepala daerah berfungsi sebagai fondasi objektif, yang kemudian diperkaya dan disesuaikan dengan visi dan misi politik yang baru. ***Berbagai forum seperti Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang menjadi arena vital untuk menajamkan program dan menyelaraskan kepentingan,*** meskipun tantangan untuk mencapai inklusivitas sejati dan menerjemahkan semua masukan ke dalam kebijakan substantif tetap ada.

Fokus strategis RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 pada pembangunan berbasis sumber daya manusia menunjukkan pemahaman mendalam tentang potensi dan tantangan kota, mengarahkan investasi pada peningkatan kualitas SDM sebagai pilar utama kemajuan. ***Selain itu, pengakuan terhadap isu-isu perkotaan yang saling terkait seperti penanganan sampah, angka kemiskinan, pendidikan, kesehatan, manajemen lalu lintas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mengindikasikan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam perumusan solusi.***

Fokus pembangunan Kota Yogyakarta (RPJMN 2025-2029) sangat terintegrasi dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan "Pembangunan Berpusat pada Manusia," penekanan pada pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, komitmen pada tata kelola yang baik, dan integrasi keberlanjutan lingkungan dengan budaya, Yogyakarta menunjukkan kemampuan menerjemahkan arahan strategis menjadi program relevan. Proses perencanaan partisipatif memastikan RPJMD yang kuat dan inklusif.

Peran sentral Bappeda sebagai koordinator teknis dan DPRD sebagai pengawas legislatif dan penganggaran menegaskan sifat RPJMD sebagai dokumen yang harus melalui validasi ganda: secara teknis dan politis. Tenggat waktu enam bulan pasca-pelantikan kepala daerah menjadi pendorong utama bagi efisiensi dan kolaborasi antarlembaga.

Secara keseluruhan, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan dokumen hidup yang terus dibentuk oleh interaksi dan negosiasi yang berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan di atas kertas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola dinamika partisipasi, menyelaraskan berbagai kepentingan, dan menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

## **Rekomendasi**

- Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Tingkat Pemerintahan Terutama untuk proyek prioritas Nasional Borobudur Yogyakarta Prambanan/BYP
- Pemanfaatan Status Keistimewaan Sebagai diferensiasi dan keunggulan kompetitif dalam pembangunan
- Integrasi Lingkungan dan Budaya dalam setiap kebijakan, memastikan pembangunan holistik dan berkelanjutan
- Investasi Berkelanjutan SDM dan Inovasi Digital, Mendukung transformasi ekonomi dan tata kelola

- Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Transparan dan Adaptif, untuk pemantauan efektif dan akuntabilitas publik

**Pimpinan Sidang, Saudara Walikota serta hadirin sekalian yang berbahagia,**

Akhirnya, dapat kami sampaikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan ini memang penting, tetapi bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan pembangunan. Hal yang lebih penting untuk dapat mewujudkannya adalah Pemimpin yang melaksanakannya yang harus visioner dan mempunyai kepemimpinan yang *decessive*, tidak peragu dan bergantung pada bawahannya. Diperlukan orisinalitas visi serta kebijakan-kebijakan berupa terobosan yang mendobrak kebekuan.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap Raperda RPJMD. Semoga pembahasan RPJMD ini benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tercinta.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**Mohammad Sofyan, S.T**

**KETUA**

**Indaruwanto Eko Cahyono**

**SEKRETARIS**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(PPP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2025**



**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA  
26 MEI 2025**

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(RPJMD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2029**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Hari/ Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB

Juru Bicara : TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Bapak Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan , Pimpinan Dewan dan Segenap  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami  
hormati.

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta.

Tamu Undangan dan Rekan rekan Wartawan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Kami memahami bahwa dokumen ini merupakan pedoman strategis yang krusial bagi arah pembangunan Kota Yogyakarta selama lima tahun ke depan, yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kota kita tercinta.

RPJMD ini tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan yang akan memandu setiap langkah pembangunan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan terukur.

Kami menyambut baik upaya komprehensif dalam penyusunan RPJMD ini, yang mengintegrasikan berbagai pendekatan mulai dari perencanaan politis, teknokratis, top-down bottom-up, hingga partisipatif.

Pendekatan multi-dimensi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya mencerminkan visi kepala daerah yang legitimate secara politis, tetapi juga didasarkan pada analisis mendalam dan data yang akurat (teknokratis), melibatkan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan (top-down bottom-up), serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (partisipatif). Ini adalah fondasi yang kuat untuk sebuah perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Setelah mencermati secara saksama setiap bab dan bagian dari dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) memiliki beberapa pandangan umum, saran, dan masukan sebagai bentuk kontribusi konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini, sbb :

### **1. Visi dan Misi yang Komprehensif**

Visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkebadaban"

Kami nilai sangat relevan dan memiliki cakupan yang luas. Kata "Adil Makmur" merefleksikan dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang merata. "Lestari" menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sumber daya.

Sementara "Berkebadaban" menegaskan pentingnya moralitas, etika, dan nilai-nilai luhur budaya, yang sangat sejalan dengan filosofi Keistimewaan Yogyakarta.

Visi dan Misi ini akan menjadi kompas bagi seluruh program dan kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta

### **2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan:**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mengapresiasi upaya Pemerintah Kota dalam menyelaraskan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Harmonisasi ini adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam

kerangka pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional.

Namun demikian, kami ingin menekankan pentingnya detail dan langkah-langkah konkret dalam menjaga harmonisasi ini. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi seringkali terjadi, dan RPJMD Kota Yogyakarta harus memiliki mekanisme adaptasi yang jelas untuk merespons perubahan tersebut tanpa mengganggu stabilitas arah pembangunan lokal. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap RPJMD ini dapat secara efektif menerjemahkan arah pembangunan yang lebih tinggi ke dalam konteks lokal Kota Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kekhasan, potensi, dan prioritas unik yang dimiliki oleh kota ini. Ini termasuk bagaimana program-program nasional dan provinsi dapat diakomodasi dan disesuaikan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Yogyakarta, serta bagaimana potensi tumpang tindih atau kesenjangan program dapat dihindari melalui koordinasi yang intensif.

### **3. Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan:**

Kami melihat bahwa pendekatan partisipatif telah menjadi bagian integral dari proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD ini. Ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi, karena partisipasi adalah pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) mendorong agar partisipasi ini tidak berhenti pada tahap penyusunan dokumen semata, melainkan terus dioptimalkan secara berkelanjutan pada tahap implementasi, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan.

Mekanisme pelibatan masyarakat, dunia usaha/swasta, dan akademisi perlu diperkuat dan dilembagakan secara formal. Ini berarti bukan hanya sekadar mengundang mereka dalam forum-forum konsultasi, tetapi juga

memberikan ruang yang lebih substantif bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan bahkan pelaksanaan program.

#### **4. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi:**

Dokumen ini secara jelas menyebutkan pentingnya sinergi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berpandangan bahwa poin ini adalah kunci keberhasilan implementasi RPJMD. Pembangunan yang kompleks di era modern tidak mungkin hanya diemban oleh pemerintah saja, dibutuhkan kolaborasi multi-pihak yang kuat. Oleh karena itu, kami menyarankan agar dalam RPJMD ini dipertegas mengenai kerangka kerja kolaborasi yang lebih operasional. Ini mencakup pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar aktor, mekanisme koordinasi yang efektif, serta insentif yang menarik bagi sektor swasta dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pencapaian target pembangunan.

#### **5. Fokus pada Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan:**

Tujuan untuk mendorong kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah fundamental dan harus menjadi prioritas utama.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai strategi konkret dan program-program unggulan yang akan difokuskan untuk mencapai pemerataan ekonomi yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat di wilayah pinggiran kota yang mungkin belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan. Bagaimana RPJMD ini akan mengatasi kesenjangan ekonomi yang mungkin terjadi di berbagai wilayah Kota Yogyakarta?

Apakah ada program afirmasi yang jelas untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, misalnya melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, atau dukungan pemasaran produk UMKM berbasis digital?

Kami juga menyarankan agar RPJMD ini secara spesifik mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan inklusif, seperti pariwisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, industri digital, atau pengembangan produk lokal unggulan. Indikator pemerataan ekonomi juga harus lebih detail, , tetapi juga pada distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar.

#### **6. Keberlanjutan Lingkungan dan Kota Berbudaya:**

Aspek keberlanjutan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban sangat relevan dan integral dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, budaya, dan pendidikan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap RPJMD ini dapat memuat program-program inovatif dan terukur dalam pengelolaan lingkungan. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, program pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir (pengurangan, daur ulang, pengolahan), pengembangan energi terbarukan di fasilitas publik, peningkatan kualitas udara dan air, serta pengembangan transportasi berkelanjutan yang mengurangi emisi karbon.

Selain itu, pelestarian warisan budaya dan lingkungan hidup harus menjadi prioritas. Bagaimana RPJMD ini akan memastikan bahwa pembangunan fisik tidak menggerus identitas budaya dan ekosistem kota? Penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban juga harus tercermin dalam indikator kinerja yang terukur, termasuk terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, bersih dari korupsi, dan

akuntabel. Ini juga mencakup upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan penerapan sistem meritokrasi.

## **7. Sistem Monitoring dan Evaluasi:**

Penyusunan RPJMD yang matang harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi (M & E) yang berkelanjutan dan robust. Tanpa M & E yang efektif, dokumen perencanaan hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak memiliki dampak nyata.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyarankan agar dalam dokumen ini dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme M & E yang akan diterapkan secara operasional.

Ini mencakup perumusan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan, penetapan target capaian yang realistis, serta frekuensi pelaporan dan evaluasi yang teratur (misalnya, triwulanan, semesteran, tahunan).

Penting juga untuk memastikan adanya fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian strategi dan program jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Mekanisme umpan balik dari M & E harus diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga pembelajaran dari implementasi dapat langsung digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem M & E juga perlu dipertimbangkan untuk efisiensi dan akuntabilitas.

Saran dan Masukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) untuk Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD:

### **1. Perumusan Target dan Indikator Kinerja yang SMART:**

Kami mendorong agar target dan indikator kinerja dalam setiap tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dapat

dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

## **2. Pemetaan Potensi dan Tantangan Berbasis Kewilayahan:**

Meskipun dokumen ini telah melalui analisis teknokratis secara umum, kami menyarankan agar dalam bagian analisis kondisi daerah, diperkaya dengan pemetaan potensi dan tantangan spesifik di tingkat kewilayahan atau kemantren.

Setiap kemantren di Kota Yogyakarta memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang unik. Dengan pemetaan yang lebih granular, program-program yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Misalnya, program pengembangan ekonomi kreatif dapat difokuskan pada kemantren yang memiliki banyak seniman, sementara program penanganan banjir dapat difokuskan pada kemantren yang rawan genangan. Data spasial dan partisipasi masyarakat lokal akan sangat membantu dalam proses pemetaan ini.

## **3. Inovasi dan Adaptasi dalam Perencanaan:**

Mengingat dinamika perubahan yang sangat cepat di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyarankan agar RPJMD ini juga membuka ruang yang cukup untuk inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan isu-isu global yang berdampak lokal. Dokumen perencanaan harus bersifat fleksibel dan tidak kaku. Ini berarti perlu ada mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengadopsi solusi-solusi inovatif, baik dalam teknologi, tata kelola, maupun pendekatan pembangunan. Fleksibilitas dalam implementasi perlu dipertimbangkan, memungkinkan penyesuaian

program dan kegiatan tanpa harus mengubah dokumen RPJMD secara keseluruhan, asalkan tetap sejalan dengan visi dan tujuan utama.

#### **4. Transparansi Anggaran dan Optimalisasi Sumber Daya:**

Transparansi mengenai proyeksi anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program utama perlu dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci.

Masyarakat dan Dewan perlu memahami secara jelas bagaimana alokasi anggaran akan mendukung pencapaian target RPJMD. Bagaimana Pemerintah Kota akan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada? Ini termasuk identifikasi potensi sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti investasi swasta, dana hibah dari pemerintah pusat atau lembaga internasional, serta efisiensi dalam belanja daerah. Mekanisme pengawasan anggaran yang ketat juga harus ditegaskan untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan.

#### **5. Aspek Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Kota:**

Mengingat posisi geografis Kota Yogyakarta yang rawan terhadap berbagai potensi risiko bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) menyarankan agar aspek mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan kota (city resilience) terhadap berbagai ancaman, termasuk bencana alam dan krisis kesehatan (seperti pandemi), diintegrasikan lebih kuat dalam strategi pembangunan RPJMD. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini yang efektif, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta penyusunan rencana kontingensi yang komprehensif. Ketahanan kota juga berarti kemampuan

kota untuk pulih dengan cepat dari guncangan dan tekanan, baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekonomi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-P3) berharap masukan dan pandangan yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyempurnakan RPJMD 2025-2029.

Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh elemen masyarakat, kita dapat merumuskan dokumen perencanaan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga implementatif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang maju, sejahtera, lestari, dan berbudaya, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang berkeadaban. Komitmen kita bersama adalah kunci untuk mencapai visi tersebut, demi masa depan Yogyakarta yang lebih baik.

Kami siap untuk terus berdiskusi, memberikan dukungan, dan bekerja sama dalam setiap tahapan penyempurnaan dan implementasi RPJMD ini demi kemajuan Kota Yogyakarta yang kita cintai ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Ketua

Sekretaris

H. SETYAJI HERMAWAN

TAUFIQ SETIAWAN, S.Sn.

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP  
PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029**



**Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta  
2 Juni 2025**

**TANGGAPAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TERHADAP**

**PENDAPAT WALIKOTA YOGYAKARTA TERKAIT  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029**

**Assalammu'alaikum Wr.Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yth. Sdr. Wali Kota beserta dengan seluruh jajaran eksekutif.**

**Yth. Pimpinan beserta anggota DPRD Kota Yogyakarta dan  
Sekretaris Dewan beserta jajarannya**

**Yth.Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota  
Yogyakarta.**

**Yth. Rekan-Rekan Wartawan dan Undangan serta hadirin yang  
berbahagia.**

**Salam Restorasi Indonesia.**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Walikota yang telah menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan dua minggu lalu.

**Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Pembangunan kota ideal membutuhkan perencanaan untuk menentukan program skala prioritas dengan menyesuaikan potensi sumber daya yang tersedia. Kota Yogyakarta sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2025-2045. Selanjutnya, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Sebagai pijakan membangun daerah, RPJMD mempunyai peranan penting dalam menentukan program kerja dan kebijakan pembangunan jangka menengah sebagai implementasi dari RPJPD. Oleh karena proses penyusunan RPJMD harus melibatkan semua *stakeholder* dengan mempertimbangkan kesinambungan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah, serta memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

## **Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Menanggapi Nota Pengantar Walikota Yogyakarta Tentang Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 kepada DPRD Kota Yogyakarta. Setelah mencermati dan menganalisis lebih detail, maka Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogyakarta akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Walikota harus menetapkan Perda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur paling lambat 6 bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik. Oleh karena, itu Kami Fraksi Partai NasDem mendukung rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
2. Sesuai amanat Undang-undang bahwa RPJMD Kota/ Kabupaten harus menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Maka, Kami Fraksi Partai NasDem menghimbau Pemkot Yogyakarta mencermati RPJMD Provinsi 2022-2027 dan RPJMN 2025-2029 serta melibatkan seluruh komponen masyarakat agar adanya kesinambungan dengan program pembangunan provinsi dan tingkat nasional, serta bisa menampung aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan.

## **Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

3. Salah satu tujuan disusunnya RPJMD adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam perencanaan tahunan. Selanjutnya, ada hal yang perlu kami

pertegas, program apa yang menjadi prioritas di tahun awal pemerintahan? Sehingga ke depannya Kami lebih mudah untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap program kerja Pemkot Yogyakarta.

4. Visi Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Adil, Lestari dan Berkeadaban.” Kami memberikan catatan kata Lestari, hal ini tentu berkaitan dengan dengan rama lingkungan. Sisi lain Kota Yogyakarta mengalami kendala pengelolaan sampah. Kami mempertegas, kebijakan strategis apa yang akan diambil Pemkot Yogyakarta agar problem sampah bisa diatasi dalam waktu dekat, sehingga Visi Lestari Kota Yogyakarta bisa diwujudkan secara maksimal? Selanjutnya harapan Kota Yogyakarta sebagai Kota berkeadaban yang menekankan pada nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Tentunya hal ini seringkali mengalami hambatan oleh fenomena klitih. Kami menekankan Pemkot Yogyakarta agar membuat kebijakan yang cepat dan tegas dalam merespon peristiwa klitih. Harapan kita bersama ke depan tidak ada lagi peristiwa klitih yang sering mengganggu ketenangan masyarakat Kota Yogyakarta.
5. Ada 5 Misi Kota Yogyakarta sebagai acuan dasar pembangunan 5 tahun ke depan dengan kurun waktu tahun 2025-2029. Kami menekankan pembahasan misi nomor 1 “Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan.” Hal ini karena sejalan Visi Kota Yogyakarta di RPJPD 2025-2045 “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-nilai Keistimewaan.” Kami memberikan catatan khusus pada Pemkot Yogyakarta untuk

melibatkan para akademisi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis ilmu pengetahuan dan riset.

**Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

6. Terkait 8 program strategis yang telah dirumuskan untuk mendukung merealisasikan Visi dan Misi Kota Yogyakarta 2025-2029, ada beberapa program yang bagi kami anggap penting sehingga perlu dipertegas. Program yang kami maksud, diantaranya Penumbuhan Wirausaha Muda bagian dari meningkatkan derajat Pendidikan keluarga, ekonomi Olahraga bagian dari meningkatkan ekonomi daerah, dan Memperkuat Akses Dana Keistimewaan untuk Warga. Bagaimana langkah kongkrit untuk merealisasikan program-program tersebut?
7. Sebagai wujud kesetaraan hak setiap individu terutama dalam pelayanan publik. Adapun yang berkaitan dengan hal ini program prioritas meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga melalui Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan. Kami Fraksi NasDem menekankan pada pihak Pemkot agar melakukan pengawasan secara optimal terhadap instansi publik baik swasta maupun punya pemerintah terutama lembaga pendidikan agar tidak ada diskriminasi terhadap kelompok ini dan dengan didukung fasilitas yang bersahabat dengan mereka.

**Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati.**

Demikian Tanggapan Fraksi ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas, sehingga kita tetap berada di jalan Nya. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, kami Fraksi Partai NasDem dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar – besarnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Restorasi Indonesia.**

Kota Yogyakarta, 2 Juni 2025

**Fraksi Partai NasDem  
DPRD Kota Yogyakarta**

Ketua

Sekretaris

**Sigit Wicaksono, S. Kom**

**Oleg Yohan**



**2025**

**RISALAH RAPAT PARIPURNA**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta**



**16**